
Diplomasi Internasional Kiai Otonom dan Termobilisasi?

Andi Purwono¹, Anna Yulia Hartati²
^{1,2}Universitas Wahid Hasyim Semarang
Email: andipurwono75@gmail.com

ABSTRACT (English)

The participation of religious actors in diplomacy has been widely discussed in existing literature. Nevertheless, little attention has been paid to the question of the independence of their diplomacy in relation to state foreign policy. This article aims to describe the participation of kiai's diplomacy as religious actors in relation to state diplomacy. This study employs a qualitative descriptive research design based on documentation analysis of relevant sources. The findings indicate evidence of diplomatic participation that is both autonomous and mobilized or invited by the state. Another finding reveals an intersection between the ideational interests of religious actors and the instrumental interests of the state. In this context, the diplomacy of religious actors within the political system input arena can function both as a source of demand and as a form of support. In the sphere of foreign policy implementation, the diplomacy of kiai can even become a determining factor in the success of government diplomacy.

Keywords: *Participation, Diplomacy, Religious Actors, Ideational Interests, Instrumental Interests*

ABSTRAK (Bahasa)

Partisipasi aktor agama dalam diplomasi telah banyak ditulis. Meski demikian, belum ada yang mengupas posisi independensi diplomasi mereka dalam kaitan dengan kebijakan luar negeri. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi diplomasi kiai sebagai aktor agama dalam kaitan dengan diplomasi negara. Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian deskriptif kualitatif dengan studi dokumentasi atas sumber yang relevan. Penelitian menemukan bahwa ada bukti partisipasi diplomasi yang bersifat otonom dan yang dimobilisasi atau diundang pihak negara. Temuan lainnya adalah adanya pertemuan kepentingan ideasional para aktor agama yang hadir bersamaan dengan kepentingan instrumental negara. Dalam kaitan itu diplomasi para aktor agama di ranah input sistem politik terkadang bisa menjadi penekan (demand) dan pendukung (support). Di ranah implementasi politik luar negeri, diplomasi para kiai bahkan bisa menjadi penentu keberhasilan diplomasi pemerintah.

Kata Kunci: Partisipasi, Diplomasi, Aktor Agama, Kepentingan Ideasional, Kepentingan Instrumental

PENDAHULUAN

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tidak mengherankan jika Islam berperan dalam kehidupan sosial politik. Salah satu peran itu bisa ditemukan

dalam ranah diplomasi. Bahkan sejak awal kemerdekaan, hal itu bisa ditemukan.

Peran agama dalam kehidupan sosial politik telah banyak ditulis. Hal itu disebabkan karena agama berpengaruh terhadap relasi sosial manusia baik yang bersifat fungsional

maupun konflik. Tulisan R. Scott Appleby menyebutkan peran ambilalasan agama yang terkadang muncul sebagai sumber harmoni namun juga kadang menjadi sebab konflik (Appleby, 2000). Charles Kimball menyebutkan bahwa agama sering ditampilkan sebagai sumber bencana dan kebencian (Kimball, 2003).

Hal yang senada dikemukakan Haynes bahwa agama di dunia memiliki kesamaan menempatkan nilai dan pandangan teologis yang berpotensi memberi kontribusi positif terhadap resolusi konflik dan pembangunan perdamaian (Haynes, 2007). Abdul Jamil Wahab juga mengatakan bahwa kadangkala agama membuat peperangan dan kadangkala membuat perdamaian (Wahab, 2014). Dalam kaitan dengan Islam, Esposito menyebutkan bahwa Islam memiliki fungsi integratif dan juga disintegratif (Esposito, 1986).

Oleh karena itu, pandangan yang seimbanglah yang lebih tepat. Jangan sampai muncul penyederhanaan berlebihan bahwa agama semata menjadi sumber konflik atau sumber perdamaian (Little, 2007). Agama dan budaya memainkan peran penting dalam konflik, tantangannya adalah mencari cara halus di mana agama dan budaya berinteraksi meredakan konflik (Gopin, 2001).

Dalam kaitan konflik, fanatisme sempit yang menafikan keberadaan agama lain seringkali menjadi tempat persemaian konflik keagamaan (Thohir, 2013). Di tingkat internasional sebagai contoh, kasus Serbia dan Bosnia di bekas negara Yugoslavia menunjukkan bahwa kedua pihak berusaha mengukir negara merdeka berdasarkan perbedaan etnis dan agama (Milligan, 2005). Dalam kaitan itu, ketika pemimpin agama memasukkan konflik dengan negara maka akan membuat sulit kompromi politik di antara masyarakat religious (Freedman, 2019).

Dalam kaitan perdamaian, telah ada tulisan tentang pengaruh pemimpin dalam resolusi konflik (Luo, 2010). Para pemimpin agama terlibat dalam upaya membangun perdamaian. Salah satu yang kemudian muncul adalah fenomena negosiasi dan

diplomasi sebagai langkah resolusi konflik agama (Shore, 2013).

Dalam hubungan internasional, diplomasi adalah soko guru penting. Diplomasi sering disebut memiliki karakter kerjasama (cooperation) dan bukan konflik (conflict). Studi terdahulu tentang diplomasi menyebutkan bahwa ada dua makna penting dari diplomasi yaitu representasi dan komunikasi. Diplomasi sering didefinisikan sebagai proses komunikasi antarnegara melalui perwakilan yang diakui sehingga sering dimaknai sebagai proses komunikasi yang diatur (Constantinou, 1995). Pada awalnya, diplomasi hanya menjadi aktivitas para pejabat resmi negara namun kini ia juga dilakukan oleh aktor bukan negara. Hamilton dan Langhorne (1995) menyebutkan aktor diplomasi bukan hanya negara namun entitas politik (Hamilton dan Langhorne, 1995). Bahkan James der Derian (1987) menekankan aspek keterasingan dengan mendefinisikan diplomasi sebagai mediasi antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau entitas-entitas yang terasing, terutama, jika ada batas identitas dan batas itu dilintasi. Sejak abad kedua puluh, diplomasi multilateral atau diplomasi konferensi banyak dilakukan sehingga menjadi ciri (Kauffman, 1996).

Tulisan Douglas Johnston (2003) menyebutkan bahwa diplomasi berbasis keyakinan ini merupakan bentuk dari diplomasi multi jalur yang berupaya mengintegrasikan keyakinan agama dengan upaya penciptaan perdamaian internasional. Diamond dan McDonald (1996) menyebutnya sebagai bagian dari multitrack diplomacy, bersama diplomasi jalur pertama oleh pemerintah, diplomasi jalur kedua ini membentuk yang turut berkontribusi dalam menciptakan serta membangun perdamaian dunia. Tujuan dari beberapa diplomasi ini adalah menciptakan serta membangun perdamaian dunia, di antaranya dengan mengurangi (menyelesaikan) konflik serta ketegangan dan kesalahpahaman antar kelompok atau bangsa. Henderson (1998) menyebutkan langkah khas yang ditempuh para pelaku diplomasi jalur kedua yaitu berusaha untuk tukar menukar informasi, menyiapkan

opini publik untuk kompromi, serta membangun strategi untuk resolusi konflik. Hal itu sejalan dengan pandangan yang melihat bahwa diplomasi adalah proses interaktif antarpihak yang meliputi upaya membangun hubungan, komunikasi informasi, negosiasi, dan pengiriman sinyal-sinyal.

Berbeda dengan beberapa tulisan terdahulu tersebut, tulisan ini hendak mendeskripsikan partisipasi diplomasi para aktor agama terutama keterkaitannya dengan kebijakan luar negeri negara. Apa yang mendorong organisasi agama berpartisipasi dalam diplomasi? Dengan kata lain, selain dorongan motivasi agama, mengapa mereka organisasi agama Indonesia turut berperan dalam diplomasi bagi Afghanistan? Untuk kepentingan itu, akan dilihat peran aktor agama dalam kasus diplomasi Indonesia bagi Afghanistan pada periode antara tahun 2001-2019.

Samuel P. Huntington dan Nelson (1994) telah lama menyebut dua tipe partisipasi yaitu partisipasi politik otonom dan partisipasi mobilisasi (Nelson dan Huntington, 1994). Yang pertama ialah partisipasi politik yang dilaksanakan tanpa paksaan dan berdasarkan kemauan partisipan secara mandiri. Partisipan berpartisipasi secara sukarela tanpa ada yang menggerakkan atau memaksa. Partisipasi politik mobilisasi ialah partisipasi politik yang digerakan oleh pihak-pihak luar. Partisipan melaksanakan partisipasinya tidak berdasarkan kemauan dan aspirasinya sendiri, melainkan didorong oleh orang luar yang ingin mengambil kesempatan darisuatu objek yang melakukan pemilihan. Tidak hanya itu pihak luar juga salah satu pola dari partisipasi politik yang bisa mempengaruhi orang banyak.

¹ Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKIS, 1994).

² Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama : Sejarah Nahdlatul Ulama 1952-1967* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2012)

³ Andi Purwono, "Organisasi Keagamaan Dan Keamanan Internasional: Beberapa Prinsip Dan

LITERATURE REVIEW

Beberapa penelitian terdahulu telah menulis diplomasi kiai maupun Nahdlatul Ulama. Martin Van Bruinsenn dalam "NU Tradisi Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru" menjelaskan lika-liku kedekatan NU dan Soekarno sampai pada perbedaan antar internal NU dengan kebijakan yang dimiliki oleh Soekarno. Kedekatan NU yang setuju dengan kebijakan yang dibuat Soekarno bisa memberikan NU akses serta kekuatan dalam melaksanakan rencana diplomasinya ditengah kebijakan PKI yang berseberangan dengan NU.¹ Greg Fealy yang berjudul "Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967" membahas keadaan serta sikap politik NU dalam berbagai kejadian politik penting dalam konteks pola kepemimpinan serta kebijakan yang dipilih oleh NU dalam masa kepemimpinan Soekarno.²

Andi Purwono yang berjudul "Organisasi keagamaan dan Keamanan Internasional: Beberapa prinsip dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia" menjelaskan tentang peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam prinsip dan praktik diplomasi yang dilakukan di dunia internasional.³ Dalam penelitian itu disebutkan tentang prinsip yang mendorong dilakukannya diplomasi Nahdlatul Ulama dalam dunia internasional.

Asep Sulaeman dan Andri Nurjaman yang berjudul "Peran KH. Idham Chalid dalam Konferensi Islam Asia Afrika di Kota Bandung Tahun 1965 menyebut peran penting serta kontribusi yang diberikan oleh KH Idham Chalid dalam konferensi Islam Asia Afrika di Bandung.⁴ Andi Purwono yang berjudul "Diplomasi Kiai Nahdlatul Ulama (NU) Melalui Konferensi Ulama Internasional"¹⁶. Purwono dalam tulisanya menjelaskan tentang bagaimana peran kiai serta Nahdlatul Ulama dalam upaya melakukan diplomasinya di dunia

Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (Nu) Indonesia" Dalam Jurnal Politik Profetik, Ilmu Politik Uin Alaudin Makasar Oktober Nomor 2 (2013).

⁴ Andri Nurjaman, Asep Sulaiman, And Agung Purnama, "Peran Kh. Idham Chalid Dalam Konferensi Islam Asia Afrika Di Kota Bandung Tahun 1965," *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 4, No. 1 (July 30, 2020): 147–176.

internasional khususnya pada acara konferensi ulama.⁵

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa riset etrdahulu tersebut. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada partisipasi kiai dalam diplomasi yang dilakukannya apakah bersifat otonom atas dasar inisiatif sendiri ataukah ada dorongan dari pihak lain terutama pemerintah. Otonomi dan mobilisasi inilah yang menajdi fokus pembahasannya.

METODE PENELITIAN

Artikel ini dihasilkan dari riset deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi berbagai sumber sekunder.

Data yang ditemukan dianalisis secara kualitatif. Langkah analisa datanya antara lain reduksi data sebagai bentuk penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang dirasa tidak diperlukan sedemikian rupa, sehingga data tersebut dapat menghasilkan sebuah informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

Langkah berikutnya adalah display data atau penyajian data yang merupakan kegiatan saat adanya sekumpulan data yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga dapat memberikan sebuah kemungkinan untuk menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), atriaks, grafik, jaringan maupun sebuah bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dengan pola hubungan, sehingga nantinya akan semakin mudah dipahami.

Langkah terakhir adalah penarikan sebuah kesimpulan dan memverifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan melihat reduksi data tetap pada tujuan analisis yang hendak dipakai. Tahap ini memiliki tujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan

dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

PEMBAHASAN DAN ANALISA

Kebijakan Indonesia dalam merespon problem Afghanistan telah lama dilakukan. Sejak era Soeharto, problem di Afghanistan telah ada. Berdasarkan pernyataan Kedutaan Besar Republik Indonesia, Afghanistan melihat Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia dan sebagai saudara sesama muslim.

Sebenarnya, hubungan bilateral antara Indonesia dan Afghanistan telah terjalin sejak pembukaan hubungan diplomatik pada tahun 1950. Indonesia dan Afghanistan pun telah menandatangani perjanjian persahabatan pada 24 April 1955. Hubungan bilateral yang baik di antara kedua negara tercermin dalam hadirnya Afghanistan dalam Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1955, dukungan yang diberikan Afghanistan kepada Indonesia pada beberapa forum internasional, seperti keanggotaan tidak tetap DK-PBB (2007-2008), Human Rights Council (2007-2010), Executive Board of World Health Organization (2007-2010), External Auditor of WHO (2008-2009 dan 2010-2011), dan United Nations Industrial Development Organization (2010-2011) (Kementerian Luar Negeri, 2010). Pemerintah Indonesia juga selalu mengikuti perkembangan di Afghanistan dari dekat dan berpandangan bahwa pembangunan ekonomi serta pelaksanaan pemerintahan yang demokratis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat akan berperan penting dalam upaya menciptakan perdamaian, stabilitas dan keamanan di Afghanistan.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia senantiasa turut serta membantu Afghanistan, khususnya dalam kerangka capacity building berupa pemberian program-program pelatihan yang dimanfaatkan oleh Afghanistan dalam kerangka Program Kerja Sama Negara-negara

⁵ Andi Purwono, "Diplomasi Kiai Nahdlatul 'Ulama (Nu) Melalui Konferensi Ulama Internasional" Dalam

Jurnal Sosio Dialektika, LP2M Universitas Wahid Hasyim, Volume 4 Nomor 2 (2020)

Berkembang (KTNB) dan program-program pelatihan teknis lainnya. Program-program yang selama ini diberikan oleh Indonesia kepada Afghanistan, melalui kerjasama dengan pihak donor, antara lain adalah berupa pendidikan tinggi di bidang Public Health, Group Training on Agribusiness Technology, Training on Community Medicine, Training on Maternal, Neonatal and Child Health Service dan Training on Empowering Women through Social Economic and Culture (reproductive health) dan telah melibatkan sebanyak 110 peserta dari Afghanistan sejak 1981-2009. Program-program tersebut dilaksanakan dalam kerangka Kerjasama Teknik Negara-Negara Berkembang (KTNB) dan Kerjasama Selatan-Selatan. Indonesia pernah membantu pejuang Afganistan melawan Uni Soviet pada Perang Dingin II yang berlangsung antara 1975-1985. Kala itu, Indonesia secara rahasia membantu persenjataan melalui Pakistan yang terletak di selatan Afganistan. Namun peran ini dirahasiakan dan tidak dipublikasikan (Tribun News, 2016).

Di era demokratisasi, politik luar negeri Indonesia dalam merespon problem Afghanistan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial politik sejak menjelang serangan Amerika Serikat pada tahun 2001. Respon tokoh dan kaum muslim Indonesia menjelang dan setelah serangan, beserta ide dan tuntutan yang disuarakannya menjadi konteks bagi munculnya sikap politik luar negeri Indonesia. Sikap politik luar negeri yang akomodatif terhadap ide kaum Muslim ini lah yang kemudian secara konsisten dilanjutkan melalui komitmen politik Indonesia dalam membantu perdamaian dan rekonsiliasi Afghanistan pada tahun-tahun berikutnya.

Beberapa saat setelah terjadinya peristiwa serangan teroris 11 September 2001, Amerika Serikat di bawah administrasi Bush mengumumkan bahwa yang bertanggung jawab atas serangan tersebut adalah organisasi teroris Al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden di Afghanistan. Tanggal 20 September Bush menyampaikan pidato di depan sidang pleno Kongres mengancam mengejar jaringan

teroris al Qaeda ke manapun sampai dapat dilumpuhkan dan dikalahkan (McClellan, 2009). Bush awalnya menggunakan terminologi crusade lalu Operation Infinite Justice (Hadibroto, et. al., 2001). Nama ini kemudian diubah (agar tidak menyinggung umat Islam yang percaya bahwa Islam mengajarkan hanya Allah yang berhak menegakkan keadilan absolut) (Azra, 2006) menjadi Operation Enduring Freedom.

Partisipasi Mandiri

Banyak aktifitas diplomasi dari organisasi keagamaan bersifat otonom. Diplomasi ini dilaksanakan tanpa paksaan dan berdasarkan kemauan partisipan secara mandiri. Mengapa organisasi Islam moderat Indonesia seperti NU dan lainnya hirau dengan isu perdamaian internasional seperti masalah Afghanistan? Jawabannya bisa berupa alasan nilai/prinsip (worldview) yang mereka yakini dan juga alasan solidaritas keagamaan (identitas) (Fox dan Shandler, 2004).

Hal itu dibuktikan dengan fakta bahwa dari sejak semula, rencana serangan Amerika Serikat ke Afghanistan tahun 2001 pasca tragedi 11 September menjadi isu internasional yang menarik perhatian muslim Indonesia. Karenanya kemudian muncul sikap berupa protes menentang rencana Amerika untuk menyerang Afghanistan. Afghanistan hanyalah batu loncatan bagi Amerika untuk menghantam kekuatan Islam di seluruh dunia (Soepriyadi, 2001). Berbagai kelompok menggunakan rencana serangan ke Afghanistan sebagai pembela Islam. Mayoritas publik Indonesia memang menentang serangan Amerika di Afghanistan (Smith, 2003).

Puncak ekspresi kaum muslim bisa disebut terjadi pada tanggal 25 September 2001 ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gerakan Pemuda Islam (GPI) dan 32 ormas Islam secara resmi mengeluarkan pernyataan bersama. Isi pernyataan itu ialah menyerukan kepada seluruh umat Islam di dunia dan pemerintah negara-negara Islam, khususnya pemerintah di negara-negara Arab untuk bersatu padu menggalang kekuatan untuk

berjuang di jalan Allah (jihad fi sabilillah) apabila agresi Amerika dan sekutunya terhadap Afghanistan dan dunia Islam terjadi. Ke dalam negeri, mereka mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk tidak terpengaruh oleh bujukan Amerika dalam mendukung rencana penyerangan ke Afghanistan (CNN, 2001).

Aksi militer Amerika ke Afganistan 7 Oktober 2001 langsung memperoleh kecaman keras dari organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Tindakan Amerika Serikat dan sekutunya dianggap bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 yang menekankan perdamaian abadi dan penghapusan penjajahan di muka bumi. Reaksi juga muncul dalam bentuk unjuk rasa dari berbagai ormas Islam, di antaranya dari Front Hizbullah, Hammas, Dakwah Umahatul Muslimat, Himpunan Mahasiswa Islam, Gerakan Pemuda Islam, HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi), dan Front Pembela Islam (FPI). Pada intinya mereka mengutuk serangan Amerika Serikat ke Afganistan. Penasihat (Mustasyar) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdurrahman Wahid dalam jumpa pers di Kantor PBNU juga turut menyatakan bahwa tindakan Amerika terhadap Afganistan seharusnya disertai bukti-bukti legal dan dilakukan secara multilateral melalui PBB. Karena itu serangan Amerika menurutnya adalah campur tangan dalam urusan Afganistan. dan sebagai contoh dari ketidakadilan dunia.

Paparan sikap organisasi agama tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif konstruktivisme hubungan internasional (Prmono dan Purwono, 2010), ada logika kepatutan yang bekerja di sini, bahwa sangat tidak patut berdiam diri melihat ketidakadilan terhadap Afghanistan berjalan. Oleh karenanya mereka merasa memiliki kepentingan untuk merespon kondisi Afghanistan dengan mengartikulasikan kepentingannya kepada pemerintah maupun Amerika. Selain itu terlihat seruan untuk peduli dan mengurangi penderitaan rakyat Afghanistan. Ini misalnya tercermin dalam seruan MUI terhadap umat Islam Indonesia

untuk melakukan aksi kemanusiaan guna mengurangi penderitaan rakyat Afghanistan.

Aspirasi dan tuntutan politik domestik kelompok Islam Indonesia terhadap pemerintahan Megawati akhirnya direspon dengan pernyataan resmi Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda bahwa aksi militer apapun di Afghanistan harus ditujukan pada target yang spesifik dan terbatas. Pernyataan tersebut menegaskan kekhawatiran tentang serangan yang akan menyakiti warga sipil dan menghancurkan Afghanistan. Kekhawatiran ini juga sejak lama disuarakan organisasi Islam Indonesia. Selanjutnya, Pada 8 Oktober 2001 pemerintah mengeluarkan enam pernyataan resmi terkait perkembangan Afghanistan. Pernyataan pemerintah pada 8 Oktober 2001 terkait hal itu yaitu: pemerintah menyampaikan perhatian mendalam bahwa serangan akhirnya dilakukan; Indonesia mencatat pernyataan Amerika bahwa serangan hanya ditujukan pada kamp pelatihan teroris dan instalasi militer, dan bahwa operasi militer bukan tindakan memerangi Islam; Indonesia berharap agar operasi militer terbatas target dan waktunya sehingga meminimalisir korban sipil; Indonesia meminta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mengambil alih respon kolektif untuk menangani situasi; Pemerintah mengingatkan agar reaksi dan simpati solidaritas masyarakat Indonesia bisa diekspresikan dalam koridor hukum; Indonesia akan menyediakan asistensi kemanusiaan untuk meringankan penderitaan rakyat Afghanistan dan mengundang partisipasi masyarakat untuk mendukung langkah ini (Gatra, 2001).

Menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolkum) saat itu, pernyataan politik tersebut telah diolah secara mendalam oleh pemerintah lewat rapat khusus Menurutnya pertimbangan pernyataan politik pemerintah itu antara lain adalah komitmen Indonesia untuk bersama-sama masyarakat internasional memerangi terorisme dalam bentuk apa pun, oleh siapa pun, dengan tujuan apa pun. Pertimbangan kedua adalah pemahaman yang mendalam atas kepentingan nasional Indonesia dan pertimbangan ketiga adalah memahami

aspirasi dan pandangan rakyat Indonesia, terutama dari saudara-saudara kita umat Islam terhadap solidaritas bagi saudara-saudaranya yang ada di Afghanistan.

Pernyataan Menkopolkam secara tegas menunjukkan bahwa ide berupa aspirasi yang disuarakan organisasi Islam ditangkap pemerintah. Poin keenam dari pernyataan resmi pemerintah menunjukkan komitmen nyata untuk membantu Afghanistan. Artinya, ini bisa disebut sebagai hal yang menandai komitmen Indonesia termasuk dalam tahap berikutnya nanti yakni dalam perdamaian dan rekonsiliasi Afghanistan di tahun-tahun berikutnya. Kaitan antara ide yang disuarakan organisasi Islam dengan struktur secara tegas bisa kita temukan dalam pernyataan Wakil Presiden Hamzah Haz. Menurutnya, Indonesia berkewajiban membantu Afghanistan karena Afghanistan adalah negara muslim sehingga tuntutan komunitas muslim terhadap pemerintah dalam isu Afghanistan ditindaklanjuti pemerintah (Jakarta Post, 2001).

Apa yang bisa dibaca dari pernyataan Wakil Presiden dan Menkopolkam? Keduanya menunjukkan dengan tegas bahwa sikap pemerintah muncul dengan memperhatikan ide dan aspirasi organisasi Islam. Pertama, ide keadilan dan ukhuwah islamiyah mengkonstruksi sikap politik luar negeri Indonesia terhadap serangan Amerika Serikat ke Afghanistan. Kedua, fakta juga menunjukkan bahwa ide Islam bisa menjadi motivator pembuatan keputusan politik luar negeri Indonesia.

Meskipun pernyataan pemerintah telah mencerminkan aspirasi muslim, tetapi kelompok-kelompok muslim tetap menyampaikan kritik (Gatra, 2001). Pemerintah dinilai pro Amerika, gagal mencegah dan tidak mengutuk serangan Amerika ke Afghanistan. Akibatnya sentimen anti-Amerika merebak di berbagai kota di Indonesia. Ajakan membela Afghanistan merebak. Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) misalnya merekrut, melatih dan mengirim relawan ke Afghanistan (Azra, 2006).

Kelompok militan melakukan demonstrasi jalanan termasuk di depan kedutaan Amerika di Jakarta dan kantor perwakilan Amerika di kota lainnya. Selain itu muncul ancaman terhadap warga Amerika dan asing lainnya, boikot produk, properti, dan simbol. Bahkan tuntutan pemutusan hubungan diplomatik dengan Amerika sebagaimana pernah disampaikan MUI disuarakan kembali beberapa kelompok radikal.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah turut mengecam serangan Amerika ke Afghanistan tetapi tidak sepekat dengan pengiriman jihad ke Afghanistan. Bagi mereka jihad tidak selalu berarti perang suci. Mereka juga menolak penyebutan tragedi 11 September 2001 sebagai tragedi agama tetapi tragedi kemanusiaan. Mereka mengajak untuk tidak mengaitkan serangan teroris dengan konflik agama. Kedua organisasi dan tokoh muslim lainnya yang moderat juga mengkritisi MUI dengan ide jihad ke Afghanistan (Azra, 2006).

Sikap pemerintah kemudian lebih tegas terhadap serangan Amerika. Dalam peringatan Maulud Nabi di Masjid Istiqlal 14 Oktober 2001, Presiden Megawati menyatakan bahwa pelaku teror memang mesti dihukum. Namun tidak bisa dibenarkan jika ada kelompok atau pemerintah rakyat atau negara lain dengan alasan apapun. Kepatuhan pada hukum harus dijalankan dan memerangi kekerasan tidak boleh dengan kekerasan lain, teror tidak bisa diselesaikan dengan teror (Sukma, 2003). Sikap pemerintah ini mendapat respon positif. Muhammadiyah menyatakan apresiasi dan mengharap tindak lanjut dalam aksi nyata. Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda dan Megawati membuat pernyataan meminta penghentian pengeboman Amerika selama bulan Ramadhan dan Natal 2001, menekankan urgensi gencatan senjata demi kepentingan kemanusiaan, dan mendorong penyelesaian politik melalui saluran diplomatik (Sukma, 2003).

Periode menjelang dan setelah serangan Amerika ke Afghanistan tahun 2001, menunjukkan bahwa Islam diakui menjadi faktor penting dalam mengkonstruksi sikap

pemerintah terhadap serangan Amerika ke Afghanistan. Meski demikian, sikap pemerintah juga tidak didikte oleh pertimbangan Islam semata. Ide keadilan dan solidaritas diterima namun langkah kebijakan yang diambil tidak sepenuhnya mengikuti kemauan tuntutan kelompok Islam. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, sikap organisasi Islam sendiri berbeda dalam hal langkah yang harus diambil pemerintah. Kelompok moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak sepakat dengan ide pemutusan hubungan diplomatik dengan Amerika. Kedua, faktor yang lebih penting karena tuntutan itu dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia.

Partisipasi Termobilisasi

Selain otonom, keterlibatan aktor agama juga sering tidak bisa dilepaskan dari kepentingan pemerintah Indonesia. Artinya, keterlibatan organisasi Islam dalam diplomasi internasional terkait dengan undangan dan ajakan pemerintah. Beberapa kasus berikut bisa memberi bukti.

Pertama, awal keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam membantu proses perdamaian Afghanistan. Pada sekitar tahun 2010, Duta Besar Indonesia untuk Afghanistan yang sudah bertugas selama dua bulan merasa kesulitan untuk menemui pihak-pihak bertikai. Padahal ia membawa misi penting Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono untuk itu. Tujuannya adalah menjamin agar pasukan perdamaian Indonesia yang direncanakan bertugas di sana bisa bertugas dengan selamat dan aman. Ketika pasukan multinasional ditarik dari Afghanistan tahun 2014, Indonesia memang berencana berpartisipasi dalam pengiriman pasukan perdamaian PBB.

Karena kesulitan tersebut maka ia kemudian kembali ke Indonesia dan meminta bantuan agar bisa berkomunikasi dengan para ulama Afghanistan. Permintaan itu ditindaklanjuti dengan pengiriman utusan Nahdlatul Ulama menemui para ulama dari pihak bertikai. Mereka kemudian bahkan diundang hadir ke Indonesia. Kegiatan kemudian terus berlanjut dengan berbagai konferensi dan saling kunjung hingga

menjelang Pandemi Covid-19 pada akhir Desember 2019.

Bukti kedua terlihat dari langkah-langkah lanjutan upaya diplomasi perdamaian yang melibatkan para aktor agama. Untuk mendorong proses perdamaian Afghanistan, muncul pemikiran agar para ulama negara itu perlu dilibatkan perannya. Untuk kepentingan itu maka para diplomasi terhadap ulama Afghanistan dilakukan baik melalui konferensi maupun kunjungan studi ke Indonesia.

Kegiatan konferensi ulama hingga kunjungan studi banding ulama Afghanistan itu tidak bisa semata dilakukan oleh diplomat resmi kementerian luar negeri. Sebaliknya proses itu akan bisa berjalan baik hanya dengan keterlibatan ulama Indonesia. Rangkaian keterlibatan ulama dalam diplomasi itu terrekam dalam berbagai kegiatan berikut.

PBNU menghadiri konferensi internasional Islamic Cooperation for A Peaceful Future in Afghanistan 2011. Pada tahun 2011, PBNU juga menghadiri konferensi internasional yang membahas mengenai perdamaian di Afghanistan yang dilaksanakan di Istanbul pada tanggal 30 November – 2 Desember 2011 (Sukma, 2003). Konferensi ini bertujuan untuk membangun jaringan ulama Afghanistan dan seluruh dunia untuk memperkuat potensi ulama demi menciptakan masa depan yang damai di Afghanistan (CRDC, 2011). Kegiatan dilanjutkan pada tahun 2012 dan 2013 (OIC, 2013).

Selanjutnya, bertolak dari kesepakatan pada pertemuan antara Delegasi Afghanistan dan PBNU 2011, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul berupaya untuk mendorong para ulama/ imam di Afghanistan untuk lebih aktif lagi berperan dalam proses rekonsiliasi dan perdamaian di Afghanistan. Bukti selanjutnya adalah keterlibatan tanggal 9 Agustus 2012 ketika Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Kabul bekerjasama dengan “Noor Educational and Capacity Development Organization” (NECDO) melaksanakan kegiatan lokakarya dengan

tema “Peran Ulama/Imam dalam Proses Rekonsiliasi dan Perdamaian di Afghanistan”.

Bukti keempat berupa kunjungan resmi tim PBNU ke Kabul 2013 dan mendapatkan fasilitas diplomatik dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI. Selain lokakarya pertemuan dengan berbagai pihak di sana menghasilkan beberapa kesepakatan. Konflik di Afghanistan juga terjadi akibat respon berlebihan sebagian umat Islam terhadap kondisi globalisasi dalam bentuk *tasahul* dan *tasyaddud* sehingga menyebabkan konflik terus meruncing dan meluas.

Selain itu, upaya pengembangan perdamaian di bidang pendidikan ini juga dilakukan dalam bentuk pembangunan Islamic Centre bagi semua aliran agama di Kabul di atas tanah seluas 5000 meter persegi. Selama ini banyak masjid dan madrasah yang dibangun dengan dasar kelompok sehingga justru memperuncing perseteruan antar kelompok. Diharapkan, Islamic Centre ini menjadi pusat pengajaran Islam yang moderat sehingga mampu mencairkan ketegangan antar kelompok dan menciptakan kerukunan umat Islam (NU, 2013).

Langkah kelima dilakukan melalui melalui penerimaan kunjungan 13 ulama Afghanistan pada tanggal 17 September 2013 (NU, 2013). Pada kesempatan ini, delegasi dari Afghanistan mengucapkan terima kasih atas komitmen PBNU yang telah berupaya mempertemukan berbagai faksi di Afghanistan untuk berdamai (NU, 2013). Rombongan ulama Afghanistan juga berkunjung ke Museum Nahdlatul Ulama Surabaya, dan kemudian muncul gagasan untuk menduplikasi Nahdlatul Ulama di Afghanistan (NU, 2013). Kunjungan ini kemudian dilanjutkan ke kampus UGM Yogyakarta untuk mempelajari Pancasila secara lebih mendalam

Di Yogyakarta ke-13 delegasi juga berkunjung ke Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. Dr. Muhammad Sulaiman Nassary, salah seorang anggota delegasi, menyatakan bahwa mereka mendapatkan pengalaman baru dalam kunjungan pertamanya ini, baik ke pesantren maupun ke

Indonesia. Anggota delegasi lainnya, Nassar Ahmad, juga menjelaskan adanya sejumlah perbedaan antara madrasah di Afghanistan dengan pesantren di Indonesia, antara lain dari segi materi. Pesantren Indonesia nuansa pendidikan tasawufnya kuat, sementara di sana (Afghanistan) kebanyakan fokus di bidang fiqih.

Langkah keenam dilakukan KBRI Kabul bekerja sama dengan NECDO Workshop Mobilizing Community Toward Peace and Development 25-26 Juni 2014. Lokakarya yang bertujuan untuk menciptakan forum dialog antara para ulama di Afghanistan ditutup dengan peresmian pendirian Nahdlatul Ulama Afghanistan (NUA). Langkah ketujuh berupa kunjungan 20 Ulama Afghanistan 28 April hingga 8 Mei 2015. Kedatangan mereka dengan tujuan untuk melihat dan berdiskusi lebih dekat mengenai praktik keberagaman di Indonesia, baik itu dari segi toleransi, pluralisme, gender, dan penegakan hak asasi manusia (Muhammadiyah, 2022).

Langkah kedelapan berupa Study and Dialogue Visit to Jakarta bagi 20 ulama Afghanistan 2016. Pada 10-16 Desember 2016, ICIS menyelenggarakan tahapan awal dari rencana serial Workshop Islam, Leadership, and Peace Building, Study and Dialogue Visit to Jakarta bagi ulama Afghanistan. Kegiatan ini diselenggarakan atas inisiatif dan dukungan mitra internasional (BangsaOnline, 2016). Dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Selasa 13 Desember 2016, Penasehat Dewan Perdamaian Tinggi Afghanistan Abdul Hakeem Mujahid dan ulama asal Afghanistan berdiskusi dengan Kalla terkait rekonsiliasi perdamaian di Afghanistan (Republika, 2016). Menurutnya, hubungan dengan Indonesia penting dalam mewujudkan perdamaian di Afghanistan apalagi Afghanistan merupakan negara dengan 99 persen masyarakat muslim (Media Indonesia, 2016). Pada hari berikutnya 14 Desember 2016, ulama Afghanistan berkunjung ke DPR dan menyatakan ketertarikannya pada Pancasila. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menerima para ulama menjelaskan bahwa Pancasila itu

persatuan antara ide keagamaan dan ide kebangsaan yang digabung sehingga tidak ada konflik antara keduanya (Detik, 2016).

Partisipasi organisasi Islam juga bisa dilihat dalam Konferensi Internasional Para Pemimpin Umat Islam Untuk Rekonsiliasi Irak, yang melibatkan dua pihak kelompok Sunni-Syiah internasional dari 8 negara, yaitu Iran, Mesir, Jordania, Malaysia, Lebanon, Pakistan, Suriah, dan Indonesia serta perwakilan dari OKI di Bogor pada tanggal 3-4 April 2007 (Antara, 2016) yang didukung oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, khususnya NU dan Muhammadiyah (Wirajuda, 2008). Dalam pidato pembukaan konferensi, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa sikapnya yang bersedia mengambil peran dalam setiap upaya perdamaian dan keadilan sosial di manapun di dunia adalah refleksi dari panggilan Islam dan juga panggilan konstitusi Indonesia yang mengamanahkan hal itu (Shoelhi, 2009).

Kepentingan Ideasional- Instrumental

Dengan beberapa bukti sebagaimana dipaparkan di atas, maka kita bisa melihat bahwa kedua bentuk partisipasi itu bisa ditemukan. Selain ada bukti ajakan atau undangan pemerintah, organisasi Islam Indonesia juga memiliki motivasi sebagai peacemakers. Hal itu pada dasarnya berakar dari panggilan keagamaan yang dalam terkait kemanusiaan (??). Prinsip kemanusiaan ini memang merupakan komitmen paling dasar dari aksi kemanusiaan yang dilakukan para aktor dalam aksi kemanusiaan (Bannet dan Weiss, 2008). Dalam bahasa NU hal itu adalah manifestasi dari prinsip persaudaraan manusia (ukhuwwah basyariyyah) sebagai bagian dari trilogi persaudaraan yaitu persaudaraan keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Menurut Ketua PBNU Marsudi Suhud (2016) hal itu disebabkan alasan pemikiran bahwa sesuai nilai dan prinsip ajaran NU maka problem negara- negara muslim harus dipecahkan. NU memiliki lambang bola dunia sehingga kiprah dan dakwahnya memang harus berskala internasional. Apalagi salah

satu pilar awalnya adalah Komite Hijaz yang bersifat internasional. Pandangan ini sejalan dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj bahwa organisasi Islam Indonesia khususnya NU berusaha mempertemukan dan menawarkan ide yang didasarkan pada nilai yang diyakininya sebagai solusi. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama misalnya, bekal keyakinan beragama Islam, asas, cita-cita dan sejumlah prinsip serta karakter berbasis syari'ah lah yang mendorong Nahdlatul Ulama mulai melangkah pasti untuk melakukan usaha-usaha konstruktif dalam menyelesaikan konflik dan mewujudkan perdamaian abadi di Afghanistan (NU, 2013). Arti penting peran Indonesia itu juga diakui karena masalah Afganistan tidak bisa diselesaikan dengan cara militer.

SIMPULAN

Berdasarkan diskusi dan pembahasan di atas, maka sejumlah kesimpulan bisa dirumuskan sebagai penutup. Pertama partisipasi diplomasi kiai dan aktor agama bisa bersifat otonom dan bisa dimobilisasi atau diundang. Keduanya bisa ditemukan buktinya dalam kasus diplomasi kiai bagi perdamaian Afghanistan.

Sebuah pernyataan hipotetik bisa diajukan bahwa jika berkaitan dengan penyampaian aspirasi dan bantuan kemanusiaan maka partisipasi diplomasi kiai tampak lebih otonom. Jika berkenaan dengan kegiatan konferensi dan kunjungan luar negeri, maka partisipasi diplomasi kiai lebih terlihat termobilisasi.

Meskipun demikian, bukan berarti partisipasi diplomasi kiai hanya terpaksa mengikuti kepentingan instrumental negara. Mereka tetap memiliki motivasi ideasional yaitu menjalankan dan menyebarkan ajaran Islam rahmatan lil alamin (Islam moderat/ washathiyah). Hal itu dibuktikan dengan pernyataan para kiai tentang alasan yang mendasari tindakannya.

Kedua, kita melihat pertemuan antara kepentingan ideasional dari organisasi agama dan kepentingan instrumental negara. Indonesia memang kemudian terus berupaya memasukkan Islam moderat sebagai image

dalam politik global. Indonesia memang dikenal sebagai negara demokrasi dengan populasi muslim terbesar yang didominasi oleh Islam Moderat. Indonesia cepat mengambil kesempatan untuk memproyeksikan identitas internasional baru dan memanfaatkan posisi uniknya untuk berusaha mengambil tindakan sebagai jembatan antara Dunia Islam dan Barat.

Ketiga, kiai dan aktor keagamaan tidak hanya berperan di area influences of foreign policy tetapi juga di ranah implementation of foreign policy. Mereka tidak hanya mempengaruhi pemerintah dengan memberi tuntutan dan dukungan dalam ranah in put sistem politik. Partisipasi mereka juga berada di ranah pelaksanaan kebijakan yaitu dengan cara apa kebijakan negara diimplementasikan. Pada ranah ini, diplomasi mereka tidak jarang menjadi penentu keberhasilan kebijakan..

REFERENSI

- Appleby, R. S. (2000). *The ambivalence of the sacred: Religion, violence, and reconciliation*. Rowman & Littlefield.
- Azra, A. (2006). *Indonesia, Islam dan demokrasi*. Solastice.
- Azra, A. (2006). *Indonesia, Islam, and democracy: Dynamics in a global context*. Solstice.
- Barnett, M., & Weiss, T. G. (Eds.). (2008). *Humanitarianism in question: Politics, power, ethics*. Cornell University Press.
- Bruinessen, Martin Van. 1994. *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKIS).
- Constantinou, C. M. (1996). *On the way to diplomacy*. University of Minnesota Press.
- Cox, B. (2013). *The nature of faith-based diplomacy*. Center for the Study of Religion and Diplomacy. http://www.ctksb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=106
- Der Derian, J. (1987). *Mediating estrangement: A theory for diplomacy*. *Review of International Studies*, 13(2), 91–110.
- Detikcom. (2001, September 25). *Jika AS serang Afghan, MUI & 32 Ormas Islam serukan jihad*.
- Diamond, L., & McDonald, J. W. (1996). *Multitrack diplomacy: A systems approach to peace*. Kumarian Press.
- Esposito, J. L. (1986). *Islam and development: Religion and sociopolitical change* (A. Rahman Zainuddin, Trans.). PT Bulan Bintang.
- Fealy, Greg. 2012. *Ijtihad Politik Ulama : Sejarah Nahdlatul Ulama 1952-1967* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara)
- Fox, J., & Sandler, S. (2004). *Bringing religion into international relations*. Palgrave Macmillan.
- Freedman, M. (2019). *Fighting from the pulpit: Religious leaders and violent conflict in Israel*. *Journal of Conflict Resolution*, 63(10), 73–94.
- Gatra. (2001, October 15). *Pernyataan sikap pemerintah*.
- Gopin, M. (2001). *Holy war, holy peace*. Oxford University Press.
- Hadibroto, I., et al. (2001). *Perang Afghanistan: Di balik persetujuan AS vs Taliban*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamilton, K., & Langhorne, R. (1995). *The practice of diplomacy: Its evolution, theory and administration*. Routledge.
- Haynes, J. (2007). *Religion and development*. Palgrave Macmillan.
- Henderson, C. (1998). *International relations: Conflict and cooperation at the turn of the 21st century*. McGraw-Hill.
- Johnston, D. (2003). *Faith-based diplomacy: Trumping realpolitik*. Oxford University Press.
- Kimball, C. (2003). *Kala agama jadi bencana* (Nurhadi, Trans.). Mizan.
- Kaufmann, J. (1996). *Conference diplomacy: An introductory analysis* (3rd ed.). MacMillan.
- Little, D. (2007). *Peacemakers in action: Profiles of religion in conflict resolution*. Cambridge University Press.
- Luo, L., Chakraborty, N., & Syracca, K. (2010). *Modelling effect of leaders in ethno-religious conflict*. Springer.
- McClellan, S. (2009). *Kebohongan di Gedung Putih: Warisan dosa-dosa Bush bagi penggantinya*. Gramedia Pustaka Utama.

- Milligan, J. A. (2005). *Islamic identity, postcoloniality, and educational policy: Schooling and ethno-religious conflict in the Southern Philippines*. Palgrave Macmillan.
- Nelson, J., & Huntington, S. P. (1994). *Partisipasi politik di negara berkembang*. Rineka Cipta.
- Nurjaman, Andri dkk. 2020. "Peran Kh. Idham Chalid Dalam Konferensi Islam Asia Afrika Di Kota Bandung Tahun 1965," *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 4, No. 1 (July 30, 2020)
- Pramono, S., & Purwono, A. (2010). *Konstruktivisme dalam studi hubungan internasional: Gagasan dan posisi teoritik*. Spektrum: Jurnal Politik Hubungan Internasional, 7(2).
- Purwono, Andi. 2013. "Organisasi Keagamaan Dan Keamanan Internasional: Beberapa Prinsip Dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (Nu) Indonesia" Dalam *Jurnal Politik Profetik, Ilmu Politik Uin Alaudin Makasar* Oktober Nomor 2 (2013).
- Purwono, Andi. 2020. "Diplomasi Kiai Nahdlatul 'Ulama (Nu) Melalui Konferensi Ulama Internasional" Dalam *Jurnal Sosio Dialektika, LP2M Universitas Wahid Hasyim, Volume 4 Nomor 2* (2020)
- Shoelhi, M. (2009). *Diplomasi damai*. Remaja Rosdakarya.
- Shore, M. (2013). *Religion and conflict resolution: Christianity and South Africa's Truth and Reconciliation Commission*. Ashgate.
- Smith, A. A. (2003). *Glass half-full: Indonesia-US relations in the age of terror*. *Contemporary Southeast Asia*, 25(3), 449–472.
- Soepriyadi, E. S. (2001). *Perang Salib jilid dua: Wajah dunia pasca kiamat kecil Amerika Serikat*. Lembaga Kajian dan Penelitian Dunia Islam Sinergi.
- Sukma, R. (2003). *Islam in Indonesian foreign policy: Domestic weakness and dilemma of dual identity*. RoutledgeCurzon.
- Sururi, A. (2016). Wawancara dengan KH. Marsudi Suhud (Ketua PBNU Bidang Luar Negeri) [Rekaman wawancara].
- Sururi, A. (2016). Wawancara dengan Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj, MA (Ketua Umum PBNU) [Rekaman wawancara].
- Thohir, M. (2013). *Multikulturalisme: Agama, budaya, dan sastra*. Gigih Pustaka Mandiri.
- Wahab, A. J. (2014). *Manajemen konflik keagamaan*. IKAPI.
- <http://www.nu.or.id/post/read/48291/peran-nu-dalam-proses-perdamaian-di-afghanistan>
- http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/34060-OKI_dan_Problematika_Dunia_Islam
- http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=11771&type=120#.WJLjt9R95kg
- Kemlu. *Kerjasama Bilateral: Afghanistan*. <http://www.kemlu.go.id/Lists/BilateralCooperation/DispForm.aspx?ID=22&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekemlu%2Ego%2Eid%2FLists%2FBilateralCooperation%2FAllItems%2Easpx>
- <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/104-agustus-2010/890-indonesia-mendukung-upaya-perdamaian-di-afghanistan.html>
- <http://www.tribunnews.com/iptek/2016/10/06/untold-story-keterlibatan-indonesia-dalam-membantu-mujahidin-afghanistan-lawan-uni-soviet?page=2>
- <http://www.oocities.org/baguala67/republika200901.htm?201719>
- <http://arsip.gatra.com/2001-09-25/artikel.php?id=10792>
- <http://www.cnn.com/2001/WORLD/asiapcf/southeast/09/25/ret.indonesia.jihad>, September 25, 2001)
- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0110/09/UTAMA/pbbh01.htm>
- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0110/09/nasional/peme06.htm>
- <https://publikasiilmiah.unwas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/485>
- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0110/09/UTAMA/pbbh01.htm>

- <http://crdc.gmu.edu/blog/2011/11/29/more-than-120-muslim-leaders-commit-to-the-future-of-afghanistan-during-international-conference-in-turkey/> diakses tanggal 15 Februari 2015 pukul 13.02
- “Pidato H. As’ad Said Ali dalam Islamic Cooperation for a Peaceful Future in Afghanistan, 30 November 2011 di Istanbul.”
- <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,33072-lang,id-c,warta-t,Hari+Ini+H+As’ad+Said+Ali+Pida+to+Perdamaian+Afganistan+di+Istanbul-.phpx>
- <http://www.kemlu.go.id/kabul/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Lokakarya-mengenai-peran-ulama-dalam-mendorong-rekonsiliasi-dan-perdamaian-di-Afganistan.aspx>
- <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,33069-lang,id-c,warta-t,NU+Buka+Jalan+Damai+Afganistan-.phpx> diakses tanggal 15 Februari 2015 pukul 12.23
- <http://www.kemlu.go.id/sanfrancisco/Pages/News.aspx?IDP=6282&l=en>
- <http://www.nu.or.id/post/read/48291/peranu-dalam-proses-perdamaian-di-afghanistan>
- <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,33069-lang,id-c,warta-t,NU+Buka+Jalan+Damai+Afganistan-.phpx> diakses tanggal 15 Februari 2015 pukul 12.23
- <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,45-id,47823-lang,id-c,internasional-t,23+Mahasiswi+Afganistan+Belajar+di+Perguruan+Tinggi+NU-.phpx> diakses tanggal 15 Februari 2015 pukul 12.32
- <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,45-id,45011-lang,id-c,internasional-t,Indonesia+Bangun+Islamic+Center+untuk+Semua+Aliran-.phpx>
- <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,45-id,47099-lang,id-c,internasional-t,NU+Sambut+Kunjungan+Ulama+Afganistan+ke+Indonesia-.phpx> diakses pada tanggal 16 Februari 2015 pukul 13.43
- <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,47171-lang,id-c,nasional-t,Ulama+Afganistan+Bersyukur+NU+Bantu+Mendamaikan-.phpx>
- <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,45-id,47122-lang,id-c,internasional-t,Kunjungi+Museum+NU++Ulama+Afganistan+Akui+Banyak+Pelajarannya-.phpx>
- <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,47129-lang,id-c,nasional-t,Ulama+Afganistan+Ingin+Duplikasi+NU+untuk+NegaraNya-.phpx>
- http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=14049&type=2#.WHxek9R95kg
- <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,47164-lang,id-c,nasional-t,Bersama+PBNU++Ulama+Afganistan+Belajar+Pancasila+di+UGM-.phpx>
- <http://www.kemlu.go.id/kabul/Pages/Embassies.aspx...>
- <http://liputanislam.com/.../nu-afghanistan-ini-dia-lambangny/>
- <http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-4524-detail-afghanistan-inginkan-persatuan-seperti-ulama-muhammadiyah--nu-dalam-membangun-indonesia.html>
- <https://www.bangsaonline.com/berita/29410/afghanistan-belajar-mengelola-konflik-dari-indonesia>
- <http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/13/oi40di359-afghanistan-belajar-perdamaian-dari-indonesia>

<http://mediaindonesia.com/news/read/82431/afghanistan-pelajari-keberagaman-dari-indonesia/2016-12-13>

<https://news.detik.com/berita/d-3371044/bertemu-ulama-afghanistan-fahri-hamzah-mereka-tertarik-dengan-pancasila>

<http://m.rmol.co/read/2016/12/15/272598/disclaimer.php> diakses pada 12 April 2017 jam 16.37 WIB.

<http://www.antaraneews.com/berita/58563/ri-siapkan-tim-kecil-bantu-rekonsiliasi-irak> diakses pada 6-10-2017 jam 07.30

http://www.ctksb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=106:the-nature-of-faith-based-diplomacy-&catid=13:journal-articles-a-occasional-papers&Itemid=31 diakses 16 Mei 2013 jam 16.00 WIB.